

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Wilayah Studi

Karakteristik wilayah studi yang akan dibahas pada studi ini terdiri dari batas administrasi wilayah studi, topografi wilayah studi, kependudukan, kondisi sarana dan prasarana wilayah studi, dan kondisi ekonomi wilayah studi.

4.1.1 Sejarah Perkembangan Ibukota Kabupaten Banyuwangi

Merujuk data sejarah yang ada, nama Banyuwangi tidak dapat terlepas dengan kejayaan Blambangan. Sejak jaman Pangeran Tawang Alun (Tahun 1655-1691) pemerintahan bertempat di Macan Putih dan diberi nama Keraton Macan Putih (Tahun 1655). Sebelum memindahkan ibukota ke Macan Putih, Tawang Alun sempat mendirikan ibukota di wilayah Rowo Bayu (kini Kecamatan Songgon). Setelah Tawang Alun meninggal, Blambangan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Buleleng di Bali. Setelah itu, VOC Belanda berusaha menguasai Blambangan. Kemudian setelah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan dan mendirikan kantor dagangnya (komplek Inggris sekarang) pada tahun 1766 di bandar kecil Banyuwangi (yang pada waktu itu juga disebut Tirtaganda, Tirtaarum atau Toyaarum), maka VOC langsung bergerak untuk segera merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Blambangan. Perang pun meletus pada 25 Maret 1767 dan pusat Blambangan dapat dikuasai VOC.

Perjuangan rakyat Blambangan dilanjutkan oleh Mas Rempeg Jagapati. Pada 18 Desember 1771, laskar Blambangan berhasil membunuh pimpinan pasukan VOC, Van Schaar. Saat itu pusat Kerajaan Blambangan berada di Lateng (sekarang Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi). Kemudian terjadi perang Puputan Bayu berlangsung sejak 2 Agustus 1771 sampai 18 Desember 1771. Setelah Perang Puputan Bayu berakhir, VOC memindahkan ibukota kerajaan ke wilayah Muncar karena letaknya yang berdekatan dengan Pelabuhan Ulupampang (kini bernama Pelabuhan Muncar). Hal ini dilakukan VOC atas pertimbangan guna mengawasi Selat Bali dikarenakan kerajaan-kerajaan Gelgel dan Mengwi di Bali berusaha merebut Blambangan kembali. Di Muncar inilah periode Kerajaan Blambangan bercorak Islam dimulai. Dari Muncar, ibu kota kerajaan kemudian berpindah ke Banyuwangi (saat ini menjadi letak Pendopo Kabupaten Banyuwangi). Pada masa ibukota di Muncar ini, otomatis eksistensi Blambangan sebagai kerajaan telah lenyap.

Permulaan pemerintahan bupati Banyuwangi pertama yaitu R. Wiroguno I (Mas Alit) terjadi tahun 1774. Pada waktu diangkat, Mas Alit berkedudukan di Ulupampang (Kecamatan Cluring) dan kemudian dengan ide Mas Alit ibu kota berpindah ke Banyuwangi. Perpindahan ibu kota yang sering terjadi itu, ada hubungannya dengan sistem kepercayaan yang berlaku umum. Ibu kota sering juga diartikan kerajaan sebagai keseluruhan, dianggap suci dan keramat. Malapetaka perang yang mengakibatkan pertumpahan darah serta wabah penyakit adalah aib besar yang dianggap menodai kesucian istana dan ibu kota. Hal ini dianggap akan menimbulkan malapetaka berantai secara sirklus oleh karena itu ibu kota dipindahkan ke Banyuwangi. Ada pula tuntutan situasi politik yang sedang berkembang, yang mengharuskan Mas Alit memindahkan ibu kota ke Banyuwangi. Kebijakan Mas Alit telah melahirkan paradigma baru pembangunan di Banyuwangi. Banyuwangi, akhirnya berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya. Terbukti, Banyuwangi eksis hingga hari ini dan terus tumbuh berkembang sebagai pusat pemerintahan yang dinamis.

Dari penjelasan sejarah bahwa letak ibukota Kabupaten Banyuwangi berpindah-pindah tempat. Perpindahan ini berada di Banyuwangi Tengah dan Banyuwangi Utara, namun Banyuwangi Selatan tidak pernah menjadi ibukota kabupaten, sehingga perkembangan di selatan masih belum berkembang.

4.1.2 Administrasi Wilayah Studi

Pada studi ini akan dibahas mengenai dua wilayah yang akan dibandingkan, yaitu Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi.

A. Banyuwangi Utara

Wilayah Banyuwangi Utara terdapat 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Glagah, Kecamatan Licin, Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Giri, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Wongsorejo dengan luas total sebesar 1.072 Km². Wilayah terluas ada pada Kecamatan Wongsorejo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Giri dengan luas sebesar 21 Km².

Wilayah ini berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso
- Sebelah Barat : Kecamatan Songgon
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kabat
- Sebelah Timur : Selat Bali

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Banyuwangi Utara

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Glagah	77
2	Licin	169
3	Banyuwangi	30
4	Giri	21
5	Kalipuro	310
6	Wongsorejo	465
Total		1.072

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012

B. Banyuwangi Selatan

Wilayah Banyuwangi Selatan terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Siliragung, Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Purwoharjo, dan Kecamatan Tegaldlimo dengan luas total sebesar 2.576 Km². Wilayah terluas berada pada Kecamatan Tegaldlimo yang juga merupakan kawasan hutan lindung Alas Purwo seluas 1.341 Km², sedangkan wilayah dengan luas terkecil berada pada Kecamatan Siliragung sebesar 95 Km². Wilayah ini berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Muncar, Kecamatan Cluring, Kecamatan Gambiran, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Glenmore
- Sebelah Barat : Kabupaten Jember
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Selat Bali

Tabel 4. 2 Luas Wilayah Banyuwangi Selatan

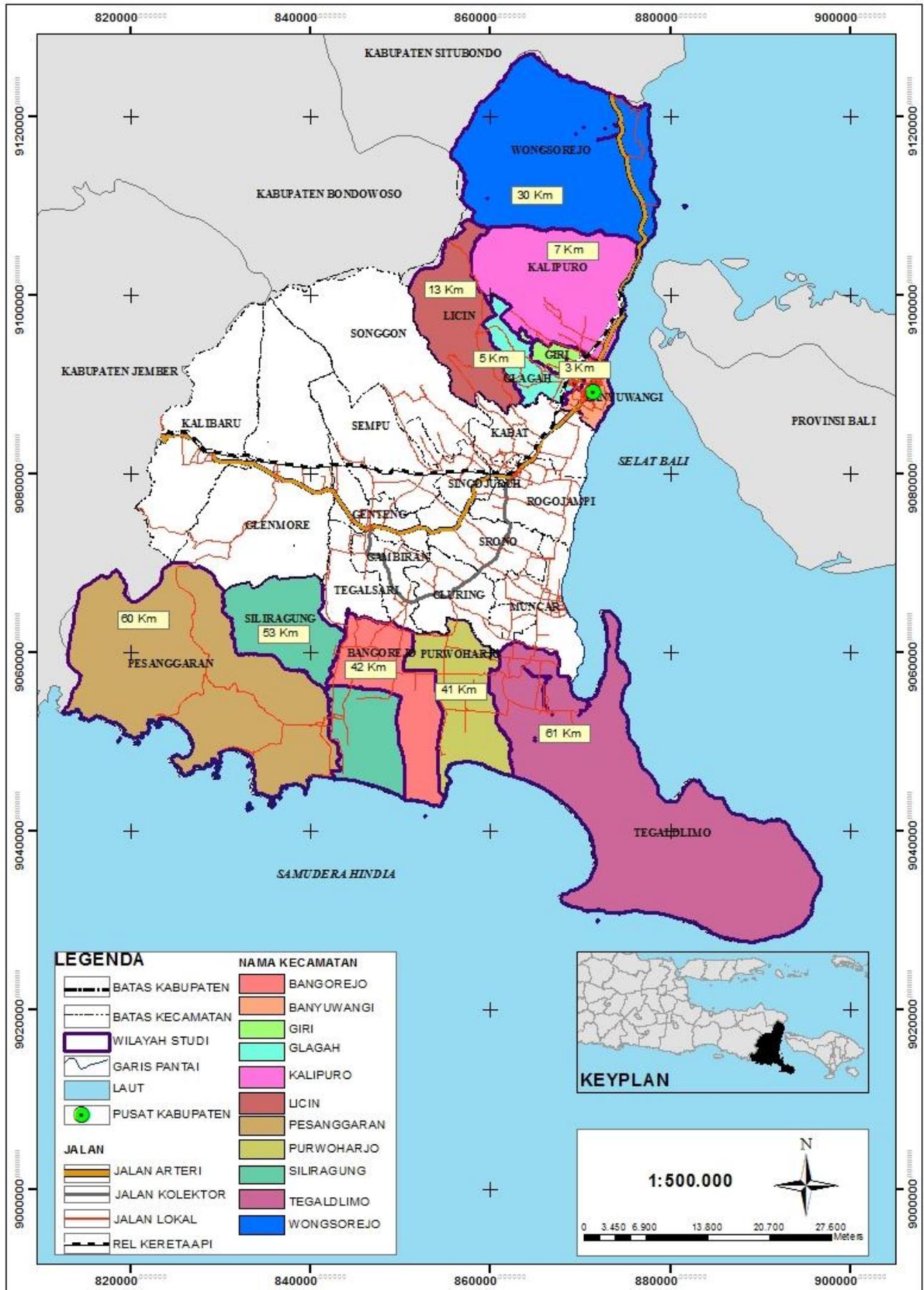
No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Pesanggaran	803
2	Siliragung	95
3	Bangorejo	137
4	Purwoharjo	200
5	Tegaldlimo	1.341
Total		2.576

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012

Tabel 4. 3 Aksesibilitas Jarak (Km) Dari Pusat Kota (Kec. Banyuwangi)

No.	Kecamatan	Km	No.	Kecamatan	Km
Banyuwangi Utara			Banyuwangi Selatan		
1.	Wongsorejo	30	1.	Pesanggaran	60
2.	Kalipuro	7	2.	Siliragung	53
3.	Giri	3	3.	Bangorejo	42
4.	Banyuwangi	0	4.	Purwoharjo	41
5.	Licin	13	5.	Tegaldlimo	61
6.	Glagah	5			

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012



Gambar 4. 2 Peta Jarak Kecamatan Ke Pusat Kabupaten

4.1.3 Topografi

Secara topografis di Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah pegunungan, sehingga mempunyai tingkat kemiringan tanah dengan rata-rata mencapai 40%. Berikut ini adalah rincian topografi ada tiap-tiap kecamatan di Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan.

Wilayah Banyuwangi Utara merupakan wilayah perpaduan pegunungan dan pantai. Kelerengan dengan luas wilayah paling besar adalah pada kelerengan 2-5% seluas 25.006,35 Km². Sedangkan wilayah Banyuwangi Selatan merupakan wilayah perpaduan bukit dan pantai. Kelerengan dengan luas wilayah paling besar adalah pada kelerengan 0-2% seluas 56.752,08 Km²

Tabel 4. 4 Luas Wilayah Menurut Kemiringan (Km²)

No	Kecamatan	Kelerengan				
		0-2%	2-5%	5-15%	15-40	>40%
Banyuwangi Utara						
1	Wongsorejo	5.538,85	14.176,48	3.441,68	10.203,27	704,67
2	Kalipuro	1.135,23	7.955,44	7.240,11	2.945,86	511,36
3	Giri	1,97	1.612,21	0	0	0
4	Banyuwangi	2.051,65	482,09	0	0	0
5	Licin	4.900,49	780,13	2.539,10	7.765,92	39
Total		13.628,19	25.006,35	13.220,89	20.915,05	1.255,03
Banyuwangi Selatan						
1	Pesanggaran	15.857,53	2.524,44	8.216,29	25.129,79	126,19
2	Siliragung	22,74	4.373,63	2.554,93	1.683,05	374,47
3	Bangorejo	9.021,07	1.820,60	1.097,37	942,64	54,9
4	Purwoharjo	10.156,90	1.231,68	418,65	157,11	0
5	Tegaldlimo	21.693,84	6.225,78	24.656,44	3.288,04	295,45
Total		56.752,08	16.176,13	36.943,68	31.200,63	851,01

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012

4.1.4 Kependudukan

Wilayah studi memiliki jumlah penduduk dan tingkat kepadatan yang berbeda-beda. Jumlah penduduk di wilayah Banyuwangi Utara pada tahun 2012 sebesar 348.787 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebesar 172.441 jiwa dan jumlah perempuan sebesar 176.346 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Banyuwangi, yang merupakan ibu kota kabupaten, sebesar 106.600 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Licin dengan jumlah penduduk sebanyak 28.029 jiwa.

Jumlah penduduk di wilayah Banyuwangi Selatan pada tahun 2012 sebesar 279.971 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebesar 141.028 jiwa dan jumlah perempuan sebesar 138.943 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Purwoharjo sebesar 65.338 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Siliragung dengan jumlah penduduk sebanyak 44.639 jiwa.

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
Banyuwangi Utara						
1	Wongsorejo	465	36.907	37.807	74714	161
2	Kalipuro	310	38.000	38.610	76610	247
3	Giri	21	14.613	14.054	28667	1345
4	Banyuwangi	30	52.328	54.272	106600	3538
5	Licin	169	13.892	14.137	28029	166
6	Glagah	77	16.701	17.466	34167	445
Total		1.072	172.441	176.346	348.787	5.902
Banyuwangi Selatan						
1	Pesanggaran	803	24628	24049	48677	61
2	Siliragung	95	22655	21984	44639	469
3	Bangorejo	137	30063	29724	59787	435
4	Purwoharjo	200	32632	32706	65338	326
5	Tegaldlimo	1.341	31050	30480	61530	46
Total		2.576	141.028	138.943	279.971	1.337

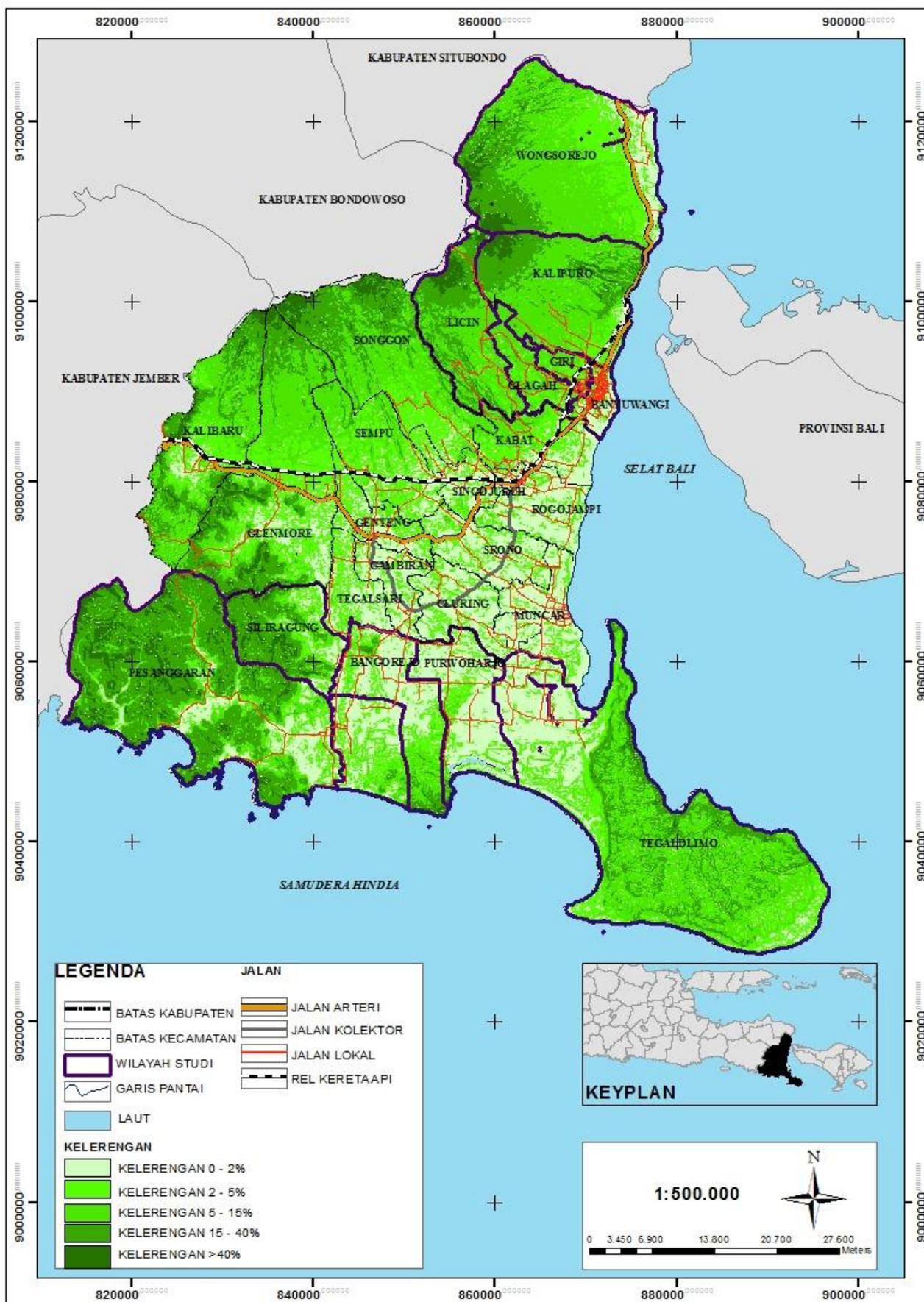
Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012

Jumlah penduduk pada lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2008-2012 menunjukkan berbagai perubahan. Pada beberapa kecamatan menunjukkan peningkatan, namun juga terdapat kecamatan yang menunjukkan penurunan. Pada wilayah Banyuwangi Utara cukup mengalami peningkatan yang signifikan pada tiap tahun. Pada tahun 2008 jumlah penduduk wilayah Banyuwangi utara sebanyak 340.238 jiwa, sedangkan pada tahun 2012 melonjak hingga 348.787 jiwa. Sedangkan pada wilayah Banyuwangi Selatan dapat dikatakan sebaliknya, terjadi penurunan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk wilayah Banyuwangi Selatan sebanyak 287.928 jiwa dan pada tahun 2012 menurun menjadi 279.971 jiwa.

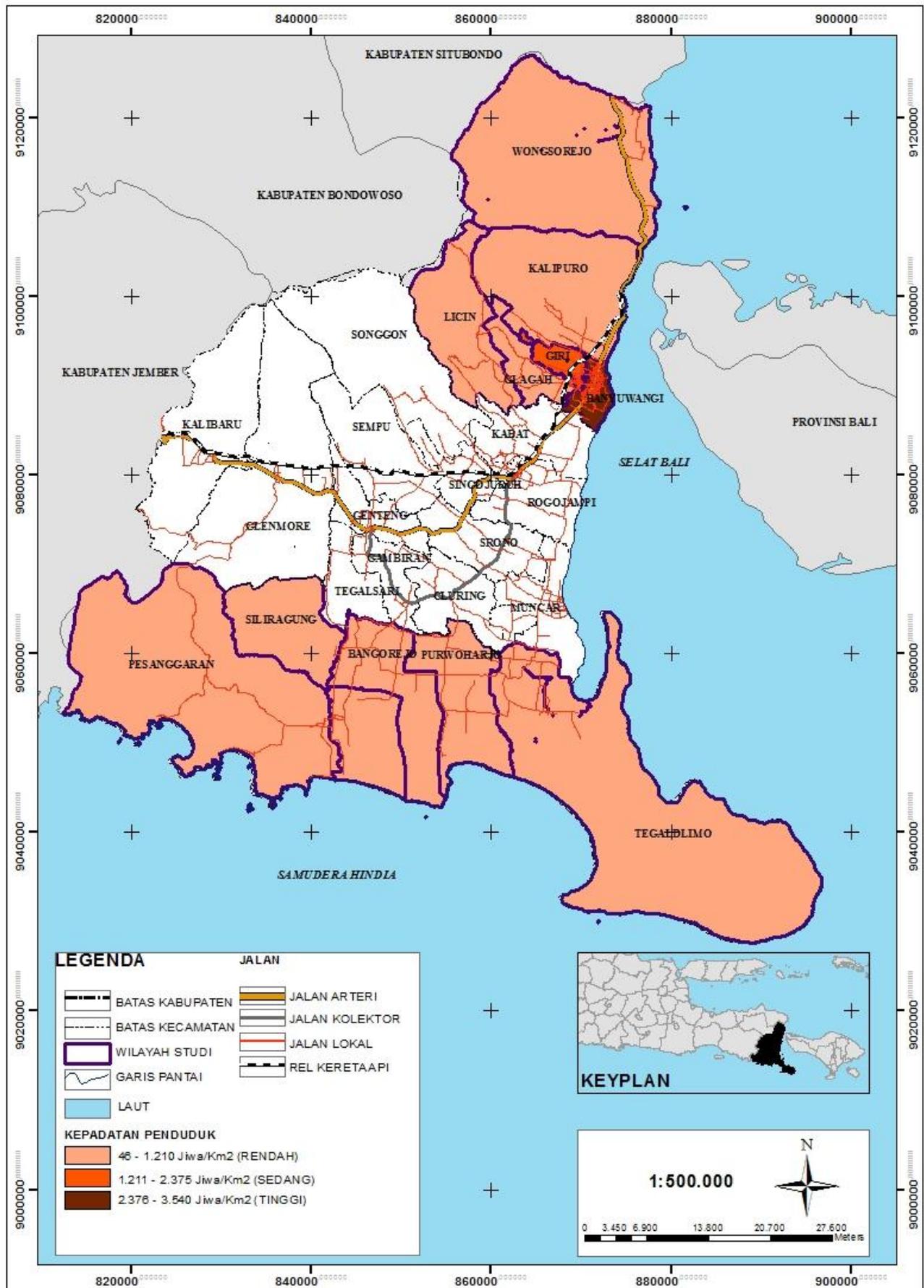
Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Tahun 2008-2012

No	Kecamatan	2008	2009	Tahun 2010	2011	2012
Banyuwangi Utara						
1	Wongsorejo	72958	71137	73281	74307	74714
2	Kalipuro	68427	68563	68722	76178	76610
3	Giri	28388	28453	28520	28510	28667
4	Banyuwangi	108112	108360	108591	106000	106600
5	Licin	28535	28613	33974	27878	28029
6	Glagah	33818	33906	28677	33992	34167
Total		340238	339032	341765	346865	348787
Banyuwangi Selatan						
1	Pesanggaran	50234	50341	45811	48412	48677
2	Siliragung	45613	45715	50455	44390	44639
3	Bangorejo	61461	61580	61732	59442	59787
4	Purwoharjo	67503	67643	67783	64969	65338
5	Tegaldlimo	63117	63256	63397	61176	61530
Total		287928	288535	289178	278389	279971

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012



Gambar 4. 3 Peta Kelerengan



Gambar 4. 4 Peta Kepadatan Penduduk

4.1.5 Sarana

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan wilayah. Jumlah sarana pendidikan yang mencukupi akan memberikan dampak positif, yaitu pemerataan pendidikan dan kualitas SDM. Sedangkan pada wilayah yang belum tercukupi akan menciptakan hal sebaliknya.

1. Taman Kanak-Kanak (TK)

Jumlah pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan cukup bervariasi.

Tabel 4. 7 Jumlah Taman Kanak-Kanak Tahun 2008-2012

No.	Kecamatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Banyuwangi Utara						
1	Wongsorejo	21	17	22	21	21
2	Kalipuro	23	33	33	31	29
3	Giri	10	12	12	12	12
4	Banyuwangi	40	39	38	39	35
5	Licin	7	5	5	5	5
6	Glagah	10	11	11	10	10
	Total	111	117	121	118	112
Banyuwangi Selatan						
1	Pesanggaran	6	19	19	20	19
2	Siliragung	21	21	23	7	22
3	Bangorejo	23	22	21	19	19
4	Purwoharjo	33	28	28	28	31
5	Tegaldlimo	41	38	40	40	39
	Total	124	128	131	114	130

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012

Perkembangan sarana pendidikan TK di Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan dari tahun ke tahun mengalami penambahan namun juga mengalami pengurangan. Puncak kenaikan masing-masing berada pada tahun 2010 dengan jumlah TK di Banyuwangi Utara mencapai 121 unit dan Banyuwangi Selatan 131 unit. Namun pada tahun 2012 jumlahnya menurun yaitu sebanyak 112 di Banyuwangi Utara dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Banyuwangi sebanyak 35 unit. Sedangkan di wilayah Banyuwangi Selatan berjumlah 130 unit dengan jumlah terbesar sebanyak 39 unit di Kecamatan Tegaldlimo.

2. Sekolah Dasar (SD)

Perkembangan sarana pendidikan SD di Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan dari tahun ke tahun mengalami penambahan namun juga mengalami pengurangan. Puncak kenaikan di Banyuwangi Utara terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah SD di Banyuwangi Utara mencapai 227 unit, sedangkan puncak kenaikan terjadi

di Banyuwangi Selatan pada tahun 2010 sebanyak 237 unit. Pada tahun 2012 di wilayah Banyuwangi Utara mengalami penurunan menjadi 211 unit dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Wongsorejo sebanyak 52 unit. Sedangkan di wilayah Banyuwangi Selatan pada tahun 2012 sebanyak 213 unit dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Tegaldlimo sebanyak 51 unit.

Tabel 4. 8 Jumlah Sekolah Dasar/ Sederajat Tahun 2008-2012

No.	Kecamatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Banyuwangi Utara						
1	Wongsorejo	47	51	51	52	52
2	Kalipuro	42	41	41	44	44
3	Giri	20	22	20	23	20
4	Banyuwangi	52	53	44	44	44
5	Licin	29	29	29	43	30
6	Glagah	23	21	21	21	21
Total		213	217	206	227	211
Banyuwangi Selatan						
1	Pesanggaran	41	41	41	40	40
2	Siliragung	37	36	33	36	36
3	Bangorejo	39	44	68	45	42
4	Purwoharjo	46	47	44	44	44
5	Tegaldlimo	51	51	51	49	51
Total		214	219	237	214	213

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Perkembangan sarana pendidikan SMP di Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan dari tahun ke tahun mengalami penambahan namun juga mengalami pengurangan.

Perkembangan sarana pendidikan SMP di Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan dari tahun ke tahun mengalami penambahan namun juga mengalami pengurangan. Puncak kenaikan di Banyuwangi Utara terjadi pada tahun 2011 dan 2012 dengan jumlah SMP di Banyuwangi Utara mencapai 52 unit, sedangkan puncak kenaikan terjadi di Banyuwangi Selatan pada tahun 2012 sebanyak 46 unit. Jumlah terbanyak di Banyuwangi Utara pada tahun 2012 berada di Kecamatan Wongsorejo sebanyak 14 unit, sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Glagah sebanyak 3 unit. Sedangkan jumlah terbanyak di Banyuwangi Selatan pada tahun 2012 berada di Kecamatan Purwoharjo sebanyak 13 unit dan paling sedikit berada di Kecamatan Pesanggaran sebanyak 7 unit.

Tabel 4. 9 Jumlah Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat Tahun 2008-2012

No.	Kecamatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Banyuwangi Utara						
1	Wongsorejo	10	10	14	14	14
2	Kalipuro	13	13	13	13	13
3	Giri	4	5	5	6	5
4	Banyuwangi	10	12	12	12	12
5	Licin	4	4	5	5	5
6	Glagah	2	2	2	2	3
	Total	43	46	51	52	52
Banyuwangi Selatan						
1	Pesanggaran	7	7	7	7	7
2	Siliragung	6	6	9	9	9
3	Bangorejo	6	6	7	7	9
4	Purwoharjo	11	11	12	12	13
5	Tegaldlimo	8	8	8	8	8
	Total	38	38	43	43	46

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012

4. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Perkembangan sarana pendidikan SMA di Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan dari tahun ke tahun mengalami penambahan namun juga mengalami pengurangan.

Perkembangan sarana pendidikan SMA di Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan dari tahun ke tahun mengalami penambahan namun juga mengalami pengurangan. Puncak kenaikan di Banyuwangi Utara terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah SMA di Banyuwangi Utara mencapai 21 unit, sedangkan puncak kenaikan terjadi di Banyuwangi Selatan pada tahun 2010 sebanyak 15 unit dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 14 unit. Jumlah terbanyak di Banyuwangi Utara pada tahun 2012 berada di Kecamatan Wongsorejo sebanyak 6 unit, sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Glagah dan Kecamatan Licin sebanyak 1 unit. Sedangkan jumlah terbanyak di Banyuwangi Selatan pada tahun 2012 berada di Kecamatan Purwoharjo dan Tegaldlimo sebanyak 4 unit dan paling sedikit berada di Kecamatan Siliragung sebanyak 1 unit.

Tabel 4. 10 Jumlah Sekolah Menengah Atas/ Sederajat Tahun 2008-2012

No.	Kecamatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Banyuwangi Utara						
1	Wongsorejo	6	5	6	6	6
2	Kalipuro	2	1	2	4	5
3	Giri	2	1	3	3	3
4	Banyuwangi	5	6	5	5	5
5	Licin	1	1	1	1	1
6	Glagah	2	1	1	1	1
	Total	18	15	18	20	21

No.	Kecamatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Banyuwangi Utara						
Banyuwangi Selatan						
1	Pesanggaran	3	4	3	2	3
2	Siliragung	1	1	1	2	1
3	Bangorejo	1	2	3	2	2
4	Purwoharjo	4	2	4	4	4
5	Tegaldlimo	4	4	4	4	4
Total		13	13	15	14	14

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012

A. Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu parameter kesejahteraan dan kualitas manusia di suatu wilayah. Kesehatan juga merupakan variabel dalam mengetahui IPM serta tercantum pada MDGs. Hal ini mencerminkan bahwa kesehatan begitu penting untuk dikaji.

1. Rumah Sakit Umum (RSU)

Tabel di bawah memperlihatkan jumlah RSU dari tahun 2008 hingga 2012. Keberadaan RSU di dua wilayah ini hanya terpusat di wilayah Banyuwangi Utara.

Tabel 4. 11 Jumlah Rumas Sakit Umum Tahun 2008-2012

No.	Kecamatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Banyuwangi Utara						
1	Wongsorejo	0	0	0	0	0
2	Kalipuro	0	0	0	0	0
3	Giri	0	0	0	0	0
4	Banyuwangi	3	3	3	4	4
5	Licin	0	0	0	0	0
6	Glagah	0	0	0	0	0
Total		3	3	3	4	4
Banyuwangi Selatan						
1	Pesanggaran	0	0	0	0	0
2	Siliragung	0	0	0	0	0
3	Bangorejo	0	0	0	0	0
4	Purwoharjo	0	0	0	0	0
5	Tegaldlimo	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012

Rumah Sakit Umum hanya berada di wilayah utara di Kecamatan Banyuwangi, hal ini mungkin karena Kecamatan Banyuwangi merupakan ibukota kabupaten sehingga tidak diragukan lagi jika fasilitasnya lebih lengkap dibanding wilayah lainnya. Jumlah RSU pada tahun 2012 sebanyak 4 unit, hanya mengalami satu penambahan dari tahun 2008.

2. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)

Jumlah Puskesmas dari tahun 2008 hingga tahun 2012 di kedua wilayah tidak mengalami perubahan.

Tabel 4. 12 Jumlah Puskesmas Tahun 2008-2012

No.	Kecamatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Banyuwangi Utara						
1	Wongsorejo	2	2	2	2	2
2	Kalipuro	2	2	2	2	2
3	Giri	1	1	1	1	1
4	Banyuwangi	3	3	3	3	3
5	Licin	1	1	1	1	1
6	Glagah	1	1	1	1	1
Total		10	10	10	10	10
Banyuwangi Selatan						
1	Pesanggaran	2	2	2	2	2
2	Siliragung	1	1	1	1	1
3	Bangorejo	2	2	2	2	2
4	Purwoharjo	2	2	2	2	2
5	Tegaldlimo	2	2	2	2	2
Total		9	9	9	9	9

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012

Jumlah Puskesmas dari tahun 2008 hingga tahun 2012 di kedua wilayah tidak mengalami perubahan. Di wilayah Banyuwangi Utara jumlah Puskesmas pada tahun 2012 sebanyak 10 unit. Puskesmas terbanyak berada di Kecamatan Banyuwangi sebanyak 3 unit, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Giri, Licin, dan Glagah masing-masing sebanyak 1 unit. Di wilayah Banyuwangi Selatan jumlah puskesmas pada tahun 2012 sebanyak 9 unit. Puskesmas terbanyak berada di Kecamatan Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, dan Tegaldlimo masing-masing sebanyak 2 unit, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Seliragung sebanyak 1 unit.

3. Puskesmas Pembantu (Pustu)

Jumlah Pustu dari tahun 2008 hingga tahun 2012 di kedua wilayah mengalami penambahan dan pengurangan.

Tabel 4. 13 Jumlah Puskesmas Pembantu Tahun 2008-2012

No.	Kecamatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Banyuwangi Utara						
1	Wongsorejo	6	6	6	6	6
2	Kalipuro	6	6	6	6	6
3	Giri	2	2	2	2	2
4	Banyuwangi	4	4	4	4	4
5	Licin	2	2	2	2	3
6	Glagah	2	2	2	2	2
Total		22	22	22	22	23
Banyuwangi Selatan						

No.	Kecamatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pesanggaran	3	3	3	3	3
2	Siliragung	5	5	5	5	4
3	Bangorejo	5	5	5	5	5
4	Purwoharjo	4	4	4	4	4
5	Tegaldlimo	4	4	4	4	4
Total		21	21	21	21	20

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012

Jumlah Pustu pada tahun 2012 di Banyuwangi Utara sebanyak 23 unit. Jumlah paling banyak berada di Kecamatan Kalipuro dan Wongsorejo masing-masing sebanyak 6 unit. Sedangkan jumlah pustu di wilayah Banyuwangi Selatan sebanyak 20 unit pada tahun 2012. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Bangorejo sebanyak 5 unit, sedangkan jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Pesanggaran sebanyak 3 unit.

4.1.6 Transportasi

A. Panjang Jalan

Banyuwangi Utara memiliki total panjang jalan 457.863 m. Jalan terpanjang berada di Kecamatan Banyuwangi yaitu 106.308 m dan jalan terpendek berada di Kecamatan Licin yaitu 37.500 m.

Banyuwangi Selatan memiliki total panjang jalan 504.950 m. Jalan terpanjang berada di Kecamatan Tegaldlimo yaitu 191.550 m dan jalan terpendek berada di Kecamatan Purwoharjo yaitu 65.250 m.

Tabel 4. 14 Panjang Jalan

No	Kecamatan	Panjang (m)
Banyuwangi Utara		
1	Wongsorejo	84.708
2	Kalipuro	66.477
3	Giri	68.814
4	Banyuwangi	106.308
5	Licin	37.500
6	Glagah	94.056
Total		457.863
Banyuwangi Selatan		
1	Pesanggaran	93.650
2	Siliragung	87.450
3	Bangorejo	67.050
4	Purwoharjo	65.250
5	Tegaldlimo	191.550
Total		504.950

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

B. Terminal

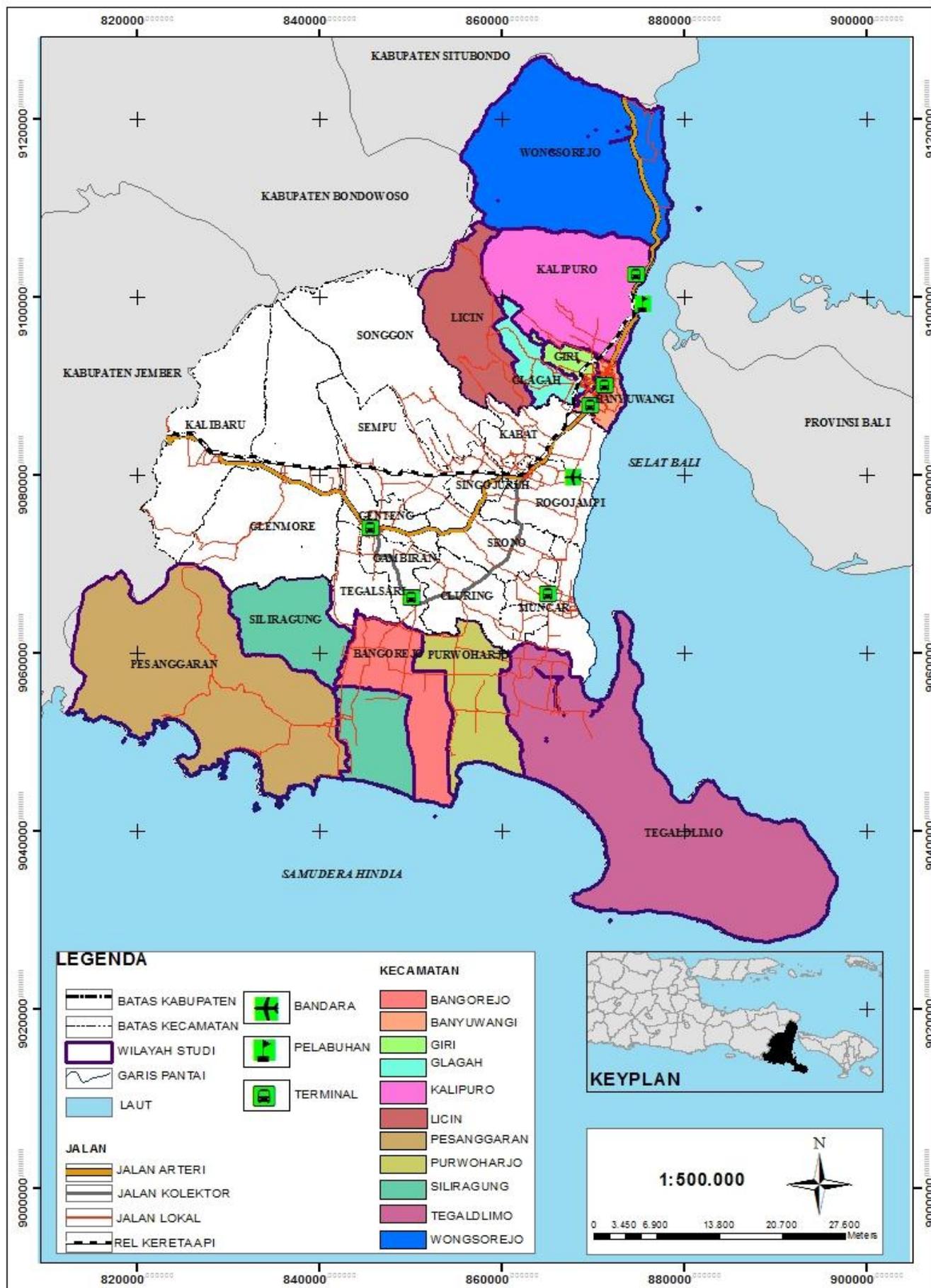
Terminal di Banyuwangi Utara hanya terdapat 3 unit terminal di Kecamatan Kalipuro dan Banyuwangi. Kecamatan Kalipuro memiliki 1 terminal tipe A dengan jumlah bis sebanyak 23 unit, dan 81 unit angkutan umum yang beroperasi. Kecamatan Banyuwangi memiliki 2 terminal tipe B dan tipe C dengan jumlah bis sebanyak 23 unit dan angkutan umum sebanyak 42 unit. Sedangkan pada kecamatan lainnya tidak terdapat terminal, bis, maupun angkutan umum.

Tabel 4. 15 Jumlah Terminal dan Angkutan Umum/Bis

No	Kecamatan	Terminal (Unit)	Angkutan Umum/Bis
Banyuwangi Utara			
1	Wongsorejo	0	0
2	Kalipuro	1	89
3	Giri	0	0
4	Banyuwangi	2	65
5	Licin	0	0
6	Glagah	0	0
Banyuwangi Selatan			
1	Pesanggaran	0	19
2	Siliragung	0	0
3	Bangorejo	0	0
4	Purwoharjo	0	0
5	Tegaldlimo	0	9

Sumber: Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi Selatan tidak memiliki terminal satupun, namun memiliki bis sebanyak 19 unit di Kecamatan pesanggaran dan 9 bis di Kecamatan Tegaldlimo. Hasil survei pada kondisi eksisting menunjukkan bahwa terminal-terminal di wilayah Banyuwangi Utara bersifat *shuttle*, yang biasanya terdapat di pusat perdagangan atau keramaian, yaitu pasar. Terminal terdekat yang ada di sekitar Banyuwangi Selatan berada di luar wilayah studi, yaitu berada di Kecamatan Gambiran yang masuk pada wilayah Banyuwangi Tengah Barat dan di Kecamatan Muncar yang masuk ada wilayah Banyuwangi Tengah Timur.



Gambar 4. 5 Peta Jaringan Jalan Wilayah Studi

4.1.7 Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang dominan (*leading sector*) dalam perekonomian suatu daerah serta untuk mengetahui pergeseran struktur ekonomi suatu daerah. Pendapatan Per Kapita digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. Kesemua kegunaan angka agregat PDRB sebagaimana dimaksud menjadi ukuran atau data statistik yang bersifat makro.

Tabel 4. 16 PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 - 2012

No.	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pertanian & Pertambangan	7160119,37	8301211,85	9318211,85	10286265,67	12.010.933,69
2.	Penggalian	616225,67	711029,49	871926,97	987524,97	1.219.057,5
3.	Industri Pengolahan	1067348,54	1169287,32	1323832,32	1498247,89	1.417.873,36
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	53819,36	59404,04	65291,83	72922,56	79.687,37
5.	Bangunan	108969,79	123977,3	138375,2	153691,8	291.086,23
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	4186643,36	4919237,17	5504954,69	6633865,54	7.726.520,33
7.	Pengangkutan & Komunikasi	536132,4	595124,63	649911,95	709807,64	810.406,17
8.	Kuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	947567,09	1085524,83	1223217,3	1397351,27	1.185.128,35
9.	Jasa-Jasa	1031039,81	611479,28	1360322,46	1527134,17	162.6694,4
Total		15707865,39	17576275,91	20456044,57	23266811,51	26.367.387,4

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2008- 2012

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 total PDRB Kabupaten Banyuwangi sebanyak 26.367.387,4 juta rupiah dengan penghasil terbesar berada pada lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha dengan penghasil terendah adalah listrik, gas dan air bersih.

Jumlah PDRB di Banyuwangi Utara sebanyak 7.561.529,57 juta rupiah. Jumlah PDRB terbanyak berada di Kecamatan Wongsorejo sebanyak 2.077.281,20 juta rupiah dengan sektor utama adalah pertanian. Sedangkan jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Glagah yaitu sebesar 604.806,96 juta rupiah.

Jumlah PDRB di Banyuwangi Selatan sebanyak 4.311.755,95 juta rupiah. Jumlah PDRB terbanyak berada di Kecamatan Purwoharjo sebanyak 1.104.632,46 juta rupiah. Sedangkan jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Siliragung yaitu sebesar 624.609,02 juta rupiah.

Tabel 4. 17 PDRB Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan Tahun 2012

No.	Kecamatan	Lapangan Usaha									Total
		Pertanian	Pertambangan & Pengegalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas, & Air Bersih	Bangunan	Perdagangan, Hotel & Restoran	Pengangkutan & Komunikasi	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	Jasa-Jasa	
Banyuwangi Utara											
1	Wongsorejo	1.522.633,39	92.311,24	31.478,39	4.122,03	5.858,88	323.047,62	14.808,35	45.254,38	37.766,93	2.077.281,21
2	Kalipuro	561.928,13	0	79.054,48	5.212,91	31.610,57	458.349,63	502.690,87	29.684,39	84.290,15	1.752.821,13
3	Giri	196.481,68	0	26.374,91	1.995,23	21.098,24	138.240,99	7.146,46	24.935,32	41.483,56	457.756,39
4	Banyuwangi	249.159,40	0	190.923,83	8.406,64	77.695,35	576.455,79	47.972,12	206.244,89	286.338,45	1.643.196,47
5	Licin	6.630,55	527.619,79	6.630,55	1.312,08	3.150,31	116.506,16	4.548,60	17.672,69	20.741,24	704.811,97
6	Glagah	268.322,48	34.510,28	21.631,44	2.644,54	4.532,07	155.682,44	7.957,16	69.314,63	40.211,92	604.806,96
	Total	2.805.155,63	654.441,31	356.093,60	23.693,43	143.945,42	1.768.282,63	585.123,56	393.106,30	510.832,25	7.240.674,13
Banyuwangi Selatan											
1	Pesanggaran	448.164,49	0	5.619,32	2.000,78	2.409,84	173.017,62	4.357,49	27.101,25	41.500,58	704.171,37
2	Siliragung	393.444,09	17.597,77	5.376,47	1.717,94	7.705,95	154.998,11	3.444,98	7.445,53	32.878,19	624.609,03
3	Bangorejo	448.458,63	0	33.249,71	2.591,00	3.156,13	357.110,74	5.795,67	21.812,95	44.917,66	917.092,49
4	Purwoharjo	632.518,91	3.047,37	9.691,89	3.059,74	7.842,98	312.509,92	9.165,69	60.178,53	66.624,42	1.104.639,45
5	Tegaldlimo	555.815,82	0	29.145,34	2.464,33	10.130,94	265.437,36	7.003,79	28.720,48	62.448,56	961.166,62
	Total	2.746.724,42	55.155,42	104.714,17	14.478,33	35.777,91	1.418.756,19	37.724,78	214.573,37	288.581,33	4.916.485,92

Sumber: IPM Kabupaten Banyuwangi 2012

4.1.8 Kebijakan

Kebijakan perwilayahan yang bersifat spasial di sini ditunjukkan oleh RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 – 2029. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan perwilayahan yang berhubungan dengan terjadinya disparitas dapat diketahui dari rencana struktur tata ruangnya terlebih dahulu. Rencana struktur ruang mengindikasikan bahwa pusat kegiatan lebih dikonsentrasikan pada wilayah utara, sedangkan wilayah selatan sebagai pusat kegiatan pendukung. Selain rencana struktur tata ruang juga dikaji mengenai aspek fungsi kawasan, sarana, transportasi/aksesibilitas, dan ekonomi, sesuai dengan variabel yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

A. Rencana Struktur Ruang

1. PKW

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang menjadi pusat pertumbuhan dan pelayanan satu atau beberapa kabupaten. Wilayah yang akan dikembangkan sebagai PKW adalah **Kawasan Perkotaan Banyuwangi**.

2. PKLp

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang nantinya akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan untuk beberapa kecamatan. Wilayah yang dikembangkan sebagai PKLp adalah: **Kalipuro, Wongsorejo, dan Bangorejo**.

3. PPK

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Wilayah yang dikembangkan sebagai **PPK Pesanggaran, Purwoharjo, Tegaldlimo, Glagah, Wongsorejo, Giri, Licin, dan Siliragung**.

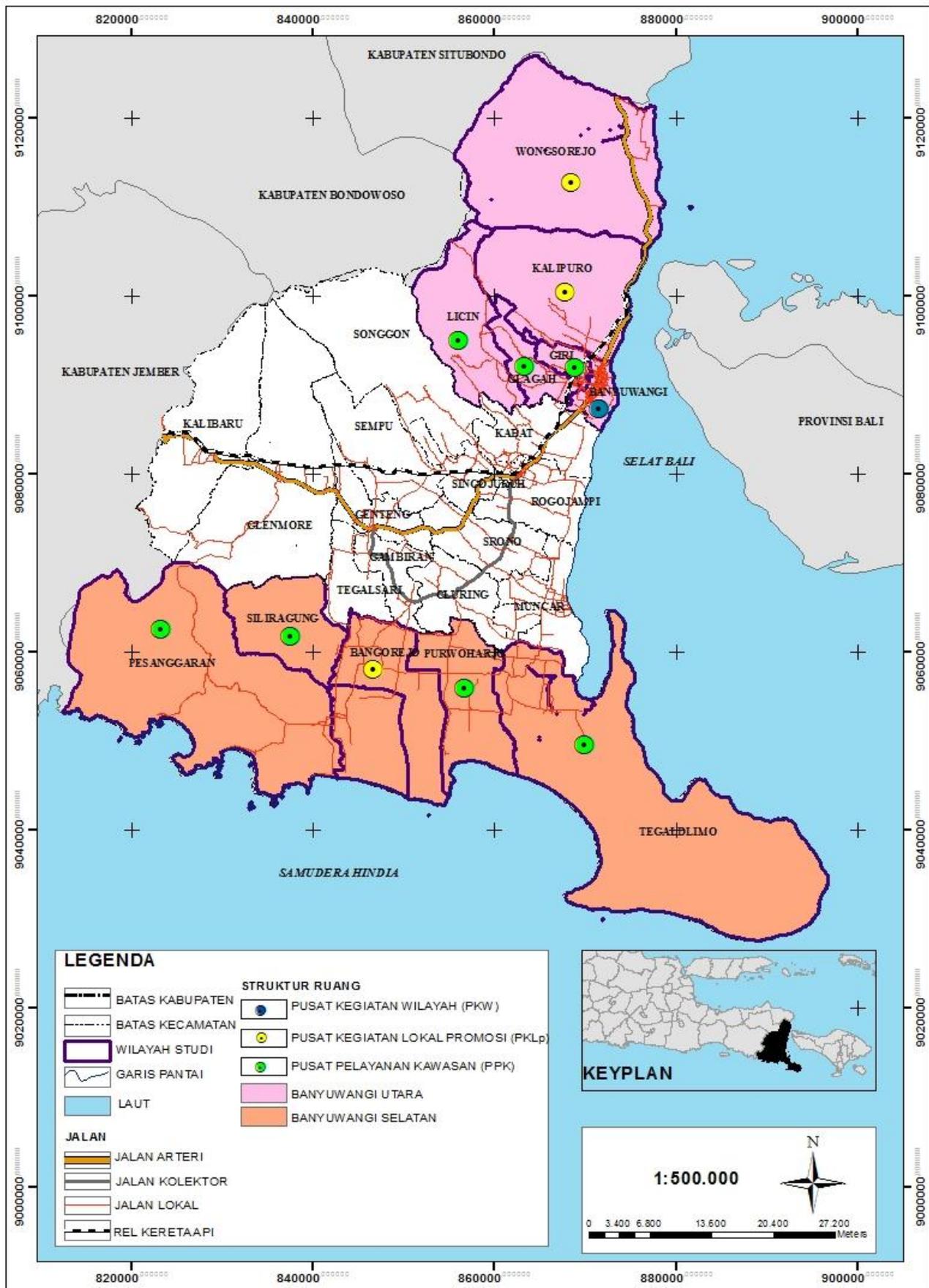
Tabel 4. 18 Kebijakan Kabupaten Banyuwangi

No.	Aspek	Banyuwangi Utara	Banyuwangi Selatan
	Fungsi Kawasan	Kecamatan Banyuwangi ditetapkan sebagai pusat pengembangan Kabupaten Banyuwangi sekaligus sebagai pusat pengembangan Cluster Banyuwangi Utara. Adapun fungsi utama dari Kota Banyuwangi adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan skala kabupaten • Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten • Pusat fasilitas umum skala kabupaten • Pusat pendidikan skala 	Kota Bangorejo ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk Cluster Banyuwangi Selatan. Kota Bangorejo sebagai pusat pertumbuhan bagi Kabupaten Banyuwangi bagian Selatan yang sekaligus berfungsi sebagai Agropolitan. Adapun fungsi utama Kota Bangorejo adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan skala kecamatan • Pusat perdagangan dan jasa skala beberapa kecamatan • Pusat fasilitas umum

No.	Aspek	Banyuwangi Utara	Banyuwangi Selatan
		kabupaten • Pusat pergudangan skala kabupaten Sedangkan untuk wilayah belakangnya meliputi Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Licin dan Glagah, dan berfungsi sebagai : <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pertanian, • Kawasan perkebunan, • Kawasan perikanan, • Kawasan peternakan • Kawasan industri, • Kawasan pelabuhan, • Kawasan lindung • Kawasan wisata 	skala beberapa kecamatan Sedangkan wilayah belakangnya meliputi Kecamatan Siliragung, Pesanggaran dan Tegaldlimo yang berfungsi sebagai : <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pertanian • Kawasan perikanan • Kawasan peternakan • Kawasan perkebunan • Kawasan pertambangan • Kawasan pariwisata • Kawasan industri kecil • Kawasan lindung
	Sarana	<p>Fasilitas Pendidikan Kebutuhan untuk fasilitas pendidikan dengan mengikuti perkembangan jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan masih dapat dipenuhi tanpa adanya penambahan bangunan. Hal ini karena hingga saat ini, jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan lebih dari cukup baik itu TK hingga Perguruan Tinggi. Arahannya hanya pada perbaikan atau rehabilitasi bangunan yang mengalami kerusakan untuk mencegah bangunan tidak dapat berfungsi dengan baik.</p> <p>Fasilitas Kesehatan Pengembangan fasilitas kesehatan akan diarahkan pada penambahan jumlah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun perencanaan. Penambahan jumlah ini adalah pada jenis Rumah Bersalin, Balai Pengobatan dan Apotik. Penambahan jumlah ini harus merata di setiap daerah (selain melihat jumlah penduduknya) untuk memastikan tiap wilayah terpenuhi kebutuhan masyarakatnya.</p> <p>Fasilitas Perdagangan Arahannya pengembangan fasilitas perdagangan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk saat ini yang menjadi perhatian adalah pemenuhan kebutuhan terhadap pasar yang melayani lingkup kecamatan di masing-masing kecamatan.</p>	
	Transpor tasi/ Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Arteri Primer, diantaranya adalah : Bajulmati (Batas Kab. Situbondo)-Ketapang, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Yos Sudarso, Jalan Gatot Subroto • Jalan Kolektor Primer (K1), diantaranya adalah : Jalan. S. Parman, Jalan. Adi Sucipto, Jalan. A.Yani, Jalan. PB. Sudirman • Kawasan Industri yang akan direncanakan di Wongsorejo juga menjadi prioritas pengembangan jalur angkutan umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jalur lintas selatan • Jalan Lokal Primer, adalah jalan-jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dengan jalan kolektor • Pada jalan lintas selatan perlu diatur rute atau jalur angkutan umum yang akan melewati jalan lintas selatan tersebut baik pada jalan arteri maupun kolektornya. • Rencana pembangunan sub terminal baru akan dikembangkan pada setiap

No.	Aspek	Banyuwangi Utara	Banyuwangi Selatan
		<p>terutama untuk mengangkut tenaga kerja yang berada di luar kawasan industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Terminal Tanjungwangi dan Terminal Brawijaya sebagai terminal utama dengan Tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota, antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan • Rencana pembangunan sub terminal baru akan dikembangkan pada setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang belum terdapat sub terminal 	<p>kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang belum terdapat sub terminal.</p>
	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan kawasan strategis pertanian tanaman pangan dengan usaha pencetakan lahan sawah baru yaitu pada kecamatan wongsorejo. Menetapkan kawasan strategis industri, untuk industri berbasis pada perikanan diarahkan pada kawasan muncar. Sedangkan untuk pengembangan kawasan industri diarahkan pada kecamatan Wongsorejo. • Pengembangan Kawasan pertanian lahan kering (ladang, kebun campur), dengan pencetakan sawah baru di Kecamatan Wongsorejo yang memanfaatkan air dari Waduk Bajulmati • pengembangan Agropolitan di Kecamatan Licin, Glagah, Kalipuro • Mengarahkan pengembangan perikanan tambak di Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Banyuwangi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan kawasan strategis pertanian tanaman pangan dengan usaha pencetakan lahan sawah baru yaitu pada kecamatan pesanggaran dan Tegaldlimo • Pengembangan Kawasan pertanian lahan kering (ladang, kebun campur), dengan pencetakan sawah baru di Kecamatan Pesanggaran dan Kecamatan Tegaldlimo yang memanfaatkan air dari Waduk Singolatri, Embung Kedawang dan Embung Lider • Pengembangan Agropolitan melalui Rencana terpadu pengembangan agropolitan, Penentuan komoditas unggulan agropolitan, yang difokuskan pada Kecamatan Bangorejo • Perairan pesisir Banyuwangi memiliki potensi perikanan yang cukup melimpah yang berupa perikanan utamanya di Kecamatan Pesanggaran • Mengarahkan pengembangan perikanan tambak di Kecamatan Tegaldlimo

Sumber: RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009-2029



Gambar 4. 6 Peta Struktur Ruang Wilayah Studi

4.2 Tingkat Disparitas

4.2.1 Analisis Ekonomi

Dari hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa dengan Indeks Williamson di Banyuwangi Utara sebesar 0,24 termasuk dalam tingkat disparitas tinggi. Sedangkan di Wilayah banyuwangi Selatan, dapat disimpulkan bahwa dengan Indeks Williamson sebesar 0,07 termasuk dalam tingkat disparitas rendah dan mencerminkan bahwa perekonomian di wilayah ini menunjukkan pemerataan yang baik.

Tabel 4. 19 Perhitungan Indeks Williamson di Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Pi)	PDRB (Juta Rp)	PDRB PerKapita (Yi) (Juta Rupiah)	Pi/ΣPi	(Yi-ŷ)	(Yi-ŷ) ²	(Pi/ΣPi)* (Yi-ŷ) ²
Banyuwangi Utara								
1	Wongsorejo	74714	2.077.281,21	27,80310531	0,214210965	6,984293824	48,78036022	10,44928806
2	Kalipuro	76610	1.752.821,13	22,87979546	0,219646948	2,060983973	4,247654939	0,932984443
3	Giri	28667	457.756,39	15,96806049	0,082190563	-4,850750996	23,52978523	1,933926302
4	Banyuwangi	106600	1.643.196,47	15,41460103	0,305630657	-5,404210452	29,20549061	8,926093287
5	Licin	28029	704.811,97	25,14581219	0,080361367	4,32700071	18,72293515	1,504600657
6	Glagah	34167	604.806,96	17,70149442	0,0979595	-3,11731706	9,71766565	0,951937665
	Σ	348787		124,9128689				24,69883041
	ŷ	58131,16667		20,81881148				
	IW							0,24
Banyuwangi Selatan								
1	Pesanggaran	48677	704.171,37	14,46620313	0,173864436	-0,798922537	0,63827722	0,110973709
2	Siliragung	44639	624.609,03	13,99245122	0,159441514	-1,272674452	1,61970026	0,258247461
3	Bangorejo	59787	917.092,49	15,33932945	0,213547117	0,074203781	0,005506201	0,001175833
4	Purwoharjo	65338	1.104.639,45	16,90653907	0,233374171	1,641413402	2,694237956	0,628765549
5	Tegaldlimo	61530	961.166,62	15,62110548	0,219772762	0,355979805	0,126721622	0,027849961
	Σ	279971		76,32562836				1,027012513
	ŷ	55994,2		15,26512567				
	IW							0,07

Sumber: Hasil Perhitungan (2013)

Analisis perekonomian yang dilihat menggunakan data PDRB di dua wilayah ini menunjukkan bahwa perekonomian di dua wilayah ini berbeda. Disparitas lebih diperlihatkan pada wilayah Banyuwangi Utara dengan PDRB per kapita tertinggi di Kecamatan Wongsorejo. Meskipun total PDRB di wilayah utara lebih tinggi dibanding wilayah selatan dan juga wilayah utara merupakan pusat ibukota, namun persebaran jumlah penduduk, PDRB per kapita tidak merata. Perbedaan antara kecamatan satu dengan yang lain cukup tinggi, PDRB per kapita berada range 17 – 27 juta, perbedaan ini sangat tinggi, yaitu sampai 10 juta rupiah. Hal berbeda diperlihatkan pada wilayah Banyuwangi Selatan, dibandingkan dengan wilayah utara, wilayah selatan memiliki penyebaran jumlah penduduk dan PDRB per kapita yang cenderung merata, perbedaan PDRB per kapita antara kecamatan satu dengan yang lainnya tidak terlalu tinggi pada

range 13 – 16 juta rupiah. Pada wilayah selatan, pendapatan perkapita tertinggi berada di Kecamatan Purwoharjo. Perekonomian di kedua wilayah ini lebih dihasilkan dari produk sumber daya alam, dan setiap daerah memiliki potensi unggulan masing-masing.

4.2.2 Analisis Sarana dan Prasarana

Analisis sarana prasarana dilakukan dan dilihat melalui perhitungan indeks skalogram dan sentralitas variabel yang dianalisis meliputi pendidikan (TK, SD, SMP, SMA), Kesehatan (RSU, Puskesmas, Puskesmas Pembantu), Perdagangan (Pasar, Toko/Warung), dan aksesibilitas (terminal, angkutan umum/bis). Ketiga variabel tersebut merupakan variabel yang cukup penting dan vital pada suatu wilayah, dengan melihat pelayanan dari persebaran sarana tersebut dapat melihat pengaruhnya pada disparitas. Variabel-variabel tersebut juga merupakan reduksi dari referensi dengan menyesuaikan pada kondisi eksisting.

Dari perhitungan sentralitas dan skalogram di wilayah Banyuwangi Utara dengan indeks fungsi tertinggi berada di Kecamatan Banyuwangi dengan nilai 438,63 dan terendah adalah Kecamatan Giri, Licin, dan Glagah. Sedangkan pada wilayah Banyuwangi Utara indeks fungsi dan skalogram tertinggi berada di Kecamatan Purwoharjo dengan total indeks fungsi 226,62 sedangkan kecamatan lainnya berada pada skalogram rendah. Namun dibandingkan dengan wilayah selatan, wilayah utara bisa dikatakan memiliki nilai lebih tinggi, hal ini dikarenakan sarana yang ada di wilayah utara lebih lengkap.

Hasil perhitungan indeks skalogram dan sentralitas disini memperlihatkan tingkat kelengkapan sarana prasarana, semakin tinggi nilainya, maka semakin baik dan semakin lengkap pembangunan di setiap daerah. Jika dihubungkan dengan tingkat disparitas maka nilai-nilai ini akan menunjukkan perbedaan pada perbandingan di dua wilayah ini. Semakin tinggi jarak perbedaan nilai satu kecamatan dengan kecamatan lain, maka menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan cukup tinggi, dan sebaliknya, begitupun jika dilihat pada dua wilayah utara dengan selatan.

Tabel 4. 20 Indeks Sentralitas Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan

No.	Kecamatan	Pendidikan				Kesehatan			Perdagangan		Aksesibilitas		Indeks Fungsi (ΣY)	Skalogram
		TK	SD	SMP	SMA	RSU	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pasar	Toko/Warung	Terminal	Angkutan Umum/Bis		
BANYUWANGI UTARA														
1	Wongsorejo	21,00	52,00	14,00	6,00	0,00	2,00	6,00	3,00	717,00	0,00	0,00	200,05	Sedang
		18,75	24,64	26,92	28,57	0,00	20,00	26,09	25,00	30,08	0,00	0,00		
2	Kalipuro	29,00	44,00	13,00	5,00	0,00	2,00	6,00	3,00	525,00	1,00	89,00	279,79	Sedang
		25,89	20,85	25,00	23,81	0,00	20,00	26,09	25,00	22,02	33,33	57,79		
3	Giri	12,00	20,00	5,00	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	305,00	0,00	0,00	83,92	Rendah
		10,71	9,48	9,62	14,29	0,00	10,00	8,70	8,33	12,79	0,00	0,00		
4	Banyuwangi	35,00	44,00	12,00	5,00	4,00	3,00	4,00	7,00	597,00	2,00	65,00	438,63	Tinggi
		31,25	20,85	23,08	23,81	100,00	30,00	17,39	58,33	25,04	66,67	42,21		
5	Licin	5,00	30,00	5,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	125,00	0,00	0,00	69,68	Rendah
		4,46	14,22	9,62	4,76	0,00	10,00	13,04	8,33	5,24	0,00	0,00		
6	Glagah	10,00	21,00	3,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	115,00	0,00	0,00	69,60	Rendah
		8,93	9,95	5,77	4,76	0,00	10,00	8,70	16,67	4,82	0,00	0,00		
	Total Fungsi (Xi)	112,00	211,00	52,00	21,00	4,00	10,00	23,00	12,00	2384,00	3,00	154,00		
	Total Centrality (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Nilai Bobot (Yi)	0,89	0,47	1,92	4,76	25,00	10,00	4,35	8,33	0,04	33,33	0,65	93,15	
BANYUWANGI SELATAN														
1	Pesanggaran	19,00	48,00	7,00	3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	376,00	0,00	19,00	198,70	Rendah
		14,62	21,72	15,22	21,43	0,00	22,22	15,00	7,69	12,94	0,00	67,86		
2	Siliragung	22,00	36,00	9,00	1,00	0,00	1,00	4,00	7,00	484,00	0,00	0,00	125,64	Rendah
		16,92	16,29	19,57	7,14	0,00	11,11	20,00	17,95	16,66	0,00	0,00		

No.	Kecamatan	Pendidikan				Kesehatan			Perdagangan		Aksesibilitas		Indeks Fungsi (ΣY)	Skalogram
		TK	SD	SMP	SMA	RSU	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pasar	Toko/Warung	Terminal	Angkutan Umum/Bis		
3	Bangorejo	19,00	42,00	9,00	2,00	0,00	2,00	5,00	9,00	437,00	0,00	0,00	152,81	Rendah
		14,62	19,00	19,57	14,29	0,00	22,22	25,00	23,08	15,04	0,00	0,00		
4	Purwoharjo	31,00	44,00	13,00	4,00	0,00	2,00	4,00	8,00	956,00	0,00	0,00	196,23	Rendah
		23,85	19,91	28,26	28,57	0,00	22,22	20,00	20,51	32,91	0,00	0,00		
5	Tegaldlimo	39,00	51,00	8,00	4,00	0,00	2,00	4,00	12,00	652,00	0,00	9,00	226,62	Sedang
		30,00	23,08	17,39	28,57	0,00	22,22	20,00	30,77	22,44	0,00	32,14		
Total Fungsi (Xi)		130,00	221,00	46,00	14,00	0,00	9,00	20,00	39,00	2905,00	0,00	28,00		
Total Centrality (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Nilai Bobot (Yi)		0,77	0,45	2,17	7,14	0,00	11,11	5,00	2,56	0,03	0,00	0,00	29,25	

Sumber: Hasil Perhitungan (2013)

Skalogram

69,6 – 192,61	Rendah
192,62 – 315,63	Sedang
315,64 - 438,65	Tinggi

4.2.3 Evaluasi Kebijakan dengan Kesenjangan Pembangunan

Dengan melihat hasil perhitungan indeks williamson, indeks sentralitas, dan skalogram maka akan dievaluasi dengan analisis kebijakan. Bagaimana melihat kebijakan dari dua wilayah tersebut dalam hubungannya dengan tingkat kesenjangan wilayah. Karena geografis, karakteristik wilayah, sumber daya alam dan kependudukan bisa dikatakan sama, namun memiliki keunggulan dengan kuantitas yang berbeda. Dengan melakukan analisis kebijakan maka akan diketahui bagaimana dukungan kebijakan wilayah dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan wilayahnya.

Tabel 4. 21 Analisis Kebijakan Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan

No.	Aspek	Banyuwangi Utara	Banyuwangi Selatan	Analisis
1.	Fungsi Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kecamatan Banyuwangi sebagai pusat yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, pusat fasilitas umum skala kabupaten, pusat pendidikan skala kabupaten, pusat pergudangan skala kabupaten. ➢ Dan wilayah belakangnya berfungsi sebagai kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan lindung, kawasan wisata 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kecamatan Bangorejo sebagai pusat yang memiliki fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala beberapa kecamatan, pusat fasilitas umum skala beberapa kecamatan. ➢ Dan wilayah belakangnya berfungsi sebagai kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan lindung 	<p>Dari kebijakan fungsi kawasan kedua wilayah tersebut dapat diketahui bahwa kesenjangan memang sudah terjadi. Hal ini dapat dilihat bahwa Banyuwangi Utara merupakan pusat kabupaten, sedangkan Banyuwangi Selatan hanya menjadi pusat kecamatan. Hal ini terlihat seperti kesenjangan rural-urban. Namun di sisi lain kedua wilayah tersebut memiliki potensi unggulan masing-masing yang dapat dilihat pada fungsi wilayah belakangnya.</p>
2.	Sarana	<p>Fasilitas Pendidikan Kebutuhan untuk fasilitas pendidikan dengan mengikuti perkembangan jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan masih dapat dipenuhi tanpa adanya penambahan bangunan. Hal ini karena hingga saat ini, jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan lebih dari cukup baik itu TK hingga Perguruan Tinggi. Arahannya pengembangan hanya pada perbaikan atau rehabilitasi bangunan yang mengalami kerusakan untuk mencegah bangunan tidak dapat berfungsi dengan baik.</p> <p>Fasilitas Kesehatan Pengembangan fasilitas kesehatan akan diarahkan pada penambahan jumlah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun perencanaan. Penambahan jumlah ini adalah pada jenis Rumah Bersalin, Balai Pengobatan dan Apotik. Penambahan jumlah ini harus merata di setiap daerah (selain melihat jumlah penduduknya) untuk memastikan tiap wilayah terpenuhi kebutuhan masyarakatnya.</p> <p>Fasilitas Perdagangan Arahannya pengembangan fasilitas perdagangan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk saat ini yang menjadi</p>	<p>Untuk kebijakan pengembangan sarana pada RTRW Kabupaten Banyuwangi tidak dijelaskan secara mendetail sampai kepada unit nya. Namun dari kebijakan yang tertera bahwa kebijakan ini ingin menciptakan pembangunan yang merata dan disesuaikan pada kebutuhan masing-masing wilayah.</p>	

No.	Aspek	Banyuwangi Utara	Banyuwangi Selatan	Analisis
		perhatian adalah pemenuhan kebutuhan terhadap pasar yang melayani lingkup kecamatan di masing-masing kecamatan.		
3.	Transportasi/ Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jalan Arteri Primer, diantaranya adalah : Bajulmati (Batas Kab. Situbondo)-Ketapang, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Yos Sudarso, Jalan Gatot Subroto ➤ Jalan Kolektor Primer (K1), diantaranya adalah : Jalan. S. Parman, Jalan. Adi Sucipto, Jalan. A.Yani, Jalan. PB. Sudirman ➤ Kawasan Industri yang akan direncanakan di Wongsorejo juga menjadi prioritas pengembangan jalur angkutan umum terutama untuk mengangkut tenaga kerja yang berada di luar kawasan industri. ➤ Pengembangan Terminal Tanjungwangi dan Terminal Brawijaya sebagai terminal utama dengan Tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota, antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan ➤ Rencana pembangunan sub terminal baru akan dikembangkan pada setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang belum terdapat sub terminal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan jalur lintas selatan ➤ Jalan Lokal Primer, adalah jalan-jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dengan jalan kolektor ➤ Pada jalan lintas selatan perlu diatur rute atau jalur angkutan umum yang akan melewati jalan lintas selatan tersebut baik pada jalan arteri maupun kolektornya. ➤ Rencana pembangunan sub terminal baru akan dikembangkan pada setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang belum terdapat sub terminal. 	Dilihat dari kebijakan mengenai transportasi, maka prioritas utama dalam pembangunan lebih condong ke arah utara, dengan asumsi pertumbuhan di utara lebih cepat sehingga memerlukan aksesibilitas yang lengkap dan bagus. Namun kebijakan ini tidak terlalu banyak mendukung pada daerah selatan, padahal kebutuhan dan pertumbuhannya mulai meningkat mengikuti pertumbuhan utara. Angkutan umum dan terminal pada wilayah selatan tidak lengkap serta pembangunan JLS yang tersendat.
4.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menetapkan kawasan strategis pertanian tanaman pangan dengan usaha pencetakan lahan sawah baru yaitu pada kecamatan wongsorejo. Menetapkan kawasan strategis industri, untuk industri berbasis pada perikanan diarahkan pada kawasan muncar. Sedangkan untuk pengembangan kawasan industri diarahkan pada kecamatan Wongsorejo. ➤ Pengembangan Kawasan pertanian lahan kering (ladang, kebun campur), dengan pencetakan sawah baru di Kecamatan Wongsorejo yang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menetapkan kawasan strategis pertanian tanaman pangan dengan usaha pencetakan lahan sawah baru yaitu pada kecamatan pesanggaran dan Tegaldlimo ➤ Pengembangan Kawasan pertanian lahan kering (ladang, kebun campur), dengan pencetakan sawah baru di Kecamatan Pesanggaran dan Kecamatan Tegaldlimo yang memanfaatkan air dari Waduk Singolatri, Embung Kedawang dan Embung Lider ➤ Pengembangan Agropolitan melalui Rencana terpadu 	Dari kebijakan perekonomian wilayah dengan memanfaatkan potensi unggulan dapat dilihat bahwa kebijakan pada kedua daerah hampir sama. Produksi unggulan pada kedua daerah adalah pertanian dan perikanan.

No.	Aspek	Banyuwangi Utara	Banyuwangi Selatan	Analisis
		memanfaatkan air dari Waduk Bajulmati pengembangan Agropolitan di Kecamatan Licin, Glagah, Kalipuro	pengembangan agropolitan, Penentuan komoditas unggulan agropolitan, yang difokuskan pada Kecamatan Bangorejo	
		➤ Mengarahkan pengembangan perikanan tambak di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi	➤ Perairan pesisir Banyuwangi memiliki potensi perikanan yang cukup melimpah yang berupa perikanan utamanya di Kecamatan Pesanggaran	
			➤ Mengarahkan pengembangan perikanan tambak di Kecamatan Tegaldlimo	

Sumber: Hasil Analisis (2013)

4.2.4 Tingkat Perkembangan Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan

Perkembangan pembangunan pada wilayah studi dari tahun ke tahun dapat menjadi acuan terhadap analisis sebelumnya. Analisis ini hanya sebagai analisis pendukung, bukan sebagai analisis utama dalam penelitian ini. Dengan menganalisis perkembangan wilayah maka dapat diketahui pembangunan selama beberapa tahun. Pada analisis ini dilakukan selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2008 hingga tahun 2010 dengan asumsi bahwa setiap 5 tahun dapat dijadikan bahan evaluasi pembangunan.

Tabel 4. 22 Indeks Perkembangan Wilayah Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan Tahun 2008 – 2012

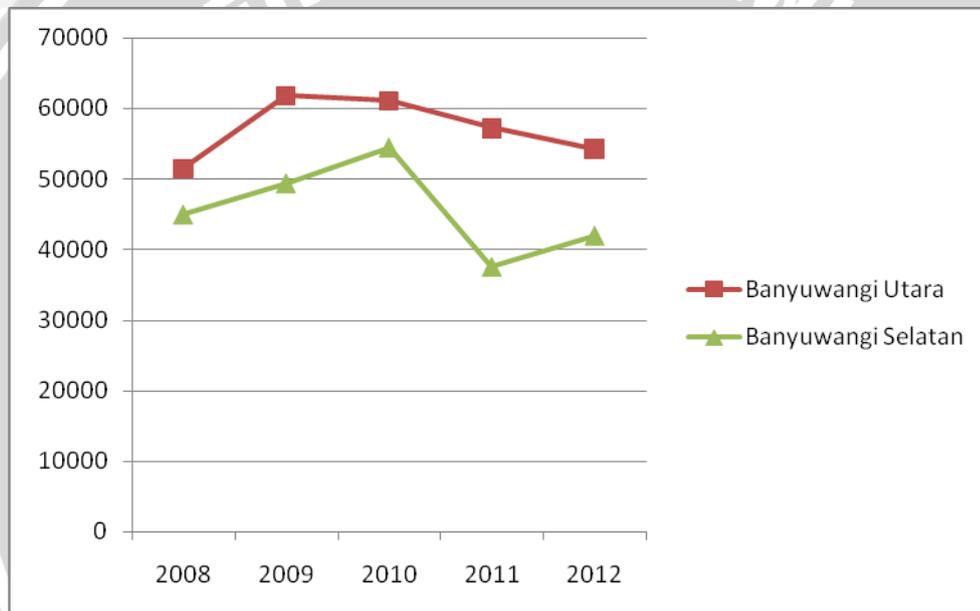
Tahun	Banyuwangi Utara	Banyuwangi Selatan	Selisih
2008	51503,19	44923,1	6.580,09
2009	61811,35	49342,2	12.469,15
2010	61118,11	54425,65	6.692,46
2011	57220,47	37498,94	19.721,53
2012	54287,41	41927,49	12.359,92
Rata-Rata	57188,11	45623,48	11.564,63

Sumber: Hasil Perhitungan (2013)

Dari hasil perbandingan pada lima tahun terakhir di dua wilayah menunjukkan bahwa perkembangan mengalami fluktuatif. Pada dasarnya mulai tahun 2008 antara kedua wilayah ini memang sudah menunjukkan perbedaan perkembangan wilayah. Total bobot di wilayah utara selalu lebih tinggi dibanding total bobot wilayah selatan. Perbedaan paling tinggi terjadi pada tahun 2011 dengan nilai perbedaan mencapai 19.721,53, sedangkan perbedaan total bobot terendah terjadi pada tahun 2008, yaitu awal tahun perhitungan analisis ini, dengan total bobot sebesar 6.580,09.

Selain itu jika dilihat secara periodik bahwa perkembangan di utara lebih baik dan dapat dikategorikan sebagai wilayah maju. Wilayah maju wilayah yang telah berkembang yang biasanya dicirikan sebagai pusat pertumbuhan. Di wilayah ini terdapat pemusatan penduduk, industri, pemerintahan, dan sekaligus pasar yang potensial. Selain itu juga dicirikan oleh tingkat pendapatan yang tinggi.

Sedangkan pada wilayah selatan perkembangan tidak terlalu mencolok. Wilayah selatan dapat dikategorikan sebagai Wilayah Belum Berkembang, wilayah yang belum berkembang dicirikan oleh tingkat pertumbuhan yang masih rendah, baik secara absolut maupun secara relatif namun memiliki potensi sumber daya alam yang belum dikelola atau dimanfaatkan. Wilayah ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah.



Gambar 4. 7 Indeks Perkembangan Wilayah Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan Tahun 2008 – 2012

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa setiap wilayah memiliki pertumbuhan yang lebih baik dari wilayah lain, namun juga sebaliknya. Sedangkan untuk variabel lainnya memiliki hasil yang bervariasi pada setiap kecamatan dan setiap tahun, perbedaannya bisa dikatakan tidak terlalu krusial, pembangunan dapat dikatakan cukup merata.

Variabel yang digunakan dalam analisis ini hanya variabel jumlah penduduk, jumlah sarana pendidikan, dan jumlah sarana kesehatan. Hal ini dikarenakan data untuk variabel lainnya tidak tersedia secara series.

4.2.5 Penentuan Faktor Paling Mempengaruhi Disparitas Wilayah

A. AHP

AHP dalam penelitian ini tidak digunakan sebagai bahan untuk melihat prioritas tertinggi pada pembangunan. AHP pada penelitian ini untuk mengetahui faktor utama yang menyebabkan disparitas dari sudut pandang para pejabat (camat atau sekretaris camat) di kecamatan yang berada di Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan. Variabel yang digunakan dalam AHP yaitu jumlah penduduk, Jumlah Sarana Pendidikan, Jumlah sarana perdagangan, Jumlah Sarana Kesehatan, Panjang Jalan, Jumlah terminal, jumlah Angkutan Umum, PDRB. Variabel ini dihasilkan dari interpretasi pustaka, kondisi eksisting dan ruang lingkup pembahasan.

Dalam menghitung AHP menggunakan Microsoft Excel yang di dalamnya telah ada formulasi dari Business Performance Management Singapore (www.bpmsg.com) yang dikembangkan oleh Klaus Geopel pada Tahun 2013, beliau menamakan program ini dengan AHPcalc. Cara kerja AHPcalc adalah dengan memasukkan input ke kolom yang berwarna hijau. Input yang dimasukkan adalah jumlah variabel, jumlah responden, objek penelitian, kriteria (variabel), dan hasil kuisisioner. Setelah dimasukkan angka-angka hasil kuisisioner maka secara otomatis akan diperlihatkan hasilnya. Selain hasil dari *eigen value*, juga secara otomatis dapat ditentukan *Consistency Ratio*. Jika hasil perhitungan menunjukkan $CR < 10\%$ maka perhitungan dianggap konsisten dan baik. Namun jika $CR > 10\%$ maka perhitungan dianggap tidak konsisten dan tidak dapat dilanjutkan ke analisis selanjutnya.

1. Banyuwangi Utara

Hasil AHP di Banyuwangi Utara menunjukkan bahwa urutan faktor paling berpengaruh yang menyebabkan disparitas wilayah adalah PDRB (20,83%), jumlah penduduk (15,50%), sarana pendidikan (12,37%), jumlah sarana perdagangan (12,24%), jumlah, jumlah sarana kesehatan (11,27%), jumlah terminal (10,53%), panjang jalan (9,35%), dan jumlah angkutan umum/bis (7,91%). Nilai CR di wilayah utara adalah sebesar 2,2% yang berarti hasil penelitian ini memiliki konsistensi bagus.

Objective	PENENTUAN FAKTOR PALING MEMPENGARUHI DISPARITAS WILAYAH BANYUWANGI UTARA		
Author	FANI ARINA		
Date	25-Mar-13	EVM check: 2,9697E-12	
Table	Criterion	Comment	Weights
	1 Jumlah Penduduk		15,5%
	2 Jumlah Sarana Pe		12,4%
	3 Jumlah Sarana Pe		12,2%
	4 Jumlah Sarana Ke		11,3%
	5 Panjang Jalan		9,3%
	6 Jumlah Terminal		10,5%
	7 Jumlah Angkutan L		7,9%
	8 PDRB		20,8%
	9	for 9&10 unprotect the input sheets and expand the	
	10	question section ("+" in row 66)	
Result	Eigenvalue	lambda:	8,215
	Consistency Ratio	0,37 GCI:	0,08 CR: 2,2%

Gambar 4. 8 Hasil Perhitungan AHP Banyuwangi Utara

Matrix											normalized principal Eigenvector
	Jumlah Penduduk	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah Sarana Perdagangan	Jumlah Sarana Kesehatan	Panjang Jalan	Jumlah Terminal	Jumlah Angkutan Umum/Bis	PDRB	0	0	
Jumlah Penduduk	1	1 4/9	1 4/9	1 3/4	1 4/9	1 3/4	1 4/9	2/3	-	-	15,50%
Jumlah Sarana Pendidikan	2/3	1	1 1/5	1 3/4	1	2	1/2	-	-	-	12,37%
Jumlah Sarana Perdagangan	2/3	1	1	1 3/4	1 4/9	1 3/4	3/7	-	-	-	12,24%
Jumlah Sarana Kesehatan	4/7	5/6	1	1 3/4	1 1/5	1 4/9	1/2	-	-	-	11,27%
Panjang Jalan	2/3	4/7	4/7	4/7	1 4/9	1 1/3	1/2	-	-	-	9,35%
Jumlah Terminal	4/7	1	2/3	5/6	2/3	1 1/5	1	-	-	-	10,53%
Jumlah Angkutan Umum/Bis	2/3	1/2	4/7	2/3	3/4	5/6	1/2	-	-	-	7,91%
PDRB	1 1/2	2 1/6	2 3/8	2 1/6	2	1	2 1/6	-	-	-	20,83%

Gambar 4. 9 Eigen Vector AHP Banyuwangi Utara

Tabel 4. 23 Bobot AHP Banyuwangi Utara

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah Sarana Perdagangan	Jumlah Sarana Kesehatan	Panjang jalan	Jumlah Terminal	Jumlah Angkutan Umum/Bis	PDRB
1	Wongsorejo	0,1	0,1	0,1	0,09	0,07	0,1	0,1	0,35
2	Giri	0,15	0,11	0,09	0,1	0,1	0,1	0,06	0,29
3	Licin	0,26	0,13	0,15	0,11	0,09	0,09	0,05	0,11
4	Banyuwangi	0,11	0,12	0,14	0,16	0,09	0,08	0,18	0,12
5	Kalipuro	0,08	0,09	0,08	0,1	0,07	0,11	0,05	0,42
6	Glagah	0,26	0,15	0,15	0,09	0,1	0,1	0,06	0,1

Sumber: Hasil Perhitungan (2013)

2. Banyuwangi Selatan

Hasil AHP di Banyuwangi Utara menunjukkan bahwa urutan faktor paling berpengaruh yang menyebabkan disparitas wilayah adalah PDRB (26,80%), jumlah penduduk (14,07%), jumlah sarana pendidikan (12,13%), jumlah sarana perdagangan (11,72%), jumlah terminal (10,80%), jumlah sarana kesehatan (10,04%), panjang jalan (8,08%), dan jumlah angkutan umum/bis (6,35%). Nilai CR di wilayah utara adalah sebesar 3,5% yang berarti hasil penelitian ini konsisten.

Objective PENENTUAN FAKTOR PALING MEMPENGARUHI DISPARITAS WILAYAH BANYUWANGI SELATAN

Author FANI ARINA

Date 25-Mar-13 EVM check: 2,32E-12

Table	Criterion	Comment	Weights	Rk
1	Jumlah Penduduk		14,1%	2
2	Jumlah Sarana Pe		12,1%	3
3	Jumlah Sarana Pe		11,7%	4
4	Jumlah Sarana Ke		10,0%	6
5	Panjang Jalan		8,1%	7
6	Jumlah Terminal		10,8%	5
7	Jumlah Angkutan		6,4%	8
8	PDRB		26,8%	1
9		for 9&10 unprotect the input sheets and expand the		
#		question section ("+" in row 66)		

Result

Eigenvalue lambda: 8,339

Consistency Ratio 0,37 GCI: 0,12 CR: 3,5%

Gambar 4. 10 Hasil Perhitungan AHP Banyuwangi Selatan

Matrix									normalized principal Eigenvector		
	Jumlah Penduduk	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah Sarana Perdagangan	Jumlah Sarana Kesehatan	Panjang Jalan	Jumlah Terminal	Jumlah Angkutan Umum/Bis	PDRB	0	0	
Jumlah Penduduk	1	1/4	1/3	1/2	1/3	1/5	1/7	1/3	-	-	14,07%
Jumlah Sarana Pendidikan	4	1	1/2	1/3	1/4	1/6	1/8	1/3	-	-	12,13%
Jumlah Sarana Perdagangan	3	2	1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/3	-	-	11,72%
Jumlah Sarana Kesehatan	2	3	2	1	1/2	1/3	1/4	1/3	-	-	10,04%
Panjang Jalan	1/2	1/3	1/4	1/5	1	1/4	1/8	3/8	-	-	8,08%
Jumlah Terminal	1/3	1/4	1/5	1/6	1	1	2	1	-	-	10,80%
Jumlah Angkutan	1/5	1/6	1/7	1/8	1/4	1	1	2/7	-	-	6,35%
PDRB	3	4	3	2	2	5	1	3	-	-	26,80%

Gambar 4. 11 Eigen Vector AHP Banyuwangi Selatan

Tabel 4. 24 Bobot AHP Banyuwangi Selatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah Sarana Perdagangan	Jumlah Sarana Kesehatan	Panjang jalan	Jumlah Terminal	Jumlah Angkutan Umum/Bis	PDRB
1	Bangorejo	0,11	0,09	0,08	0,08	0,06	0,1	0,07	0,41
2	Siliragung	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,11	0,06	0,45
3	Pesanggaran	0,14	0,14	0,12	0,14	0,11	0,11	0,07	0,18
4	Purwoharjo	0,16	0,15	0,13	0,11	0,08	0,06	0,06	0,25
5	Tegaldlimo	0,2	0,17	0,2	0,1	0,08	0,11	0,05	0,1

B. Skoring AHP

Bobot-bobot yang dihasilkan pada analisis AHP akan dilanjutkan pada analisis skoring. Analisis ini bertujuan untuk melihat tingkat disparitas oleh variabel yang berpengaruh. Bobot akan diberikan rating sesuai dengan penggolongan skala. Semakin tinggi total perhitungannya maka menunjukkan bahwa tingkat disparitas lebih tinggi dibanding dengan wilayah lain pada 8 variabel yang telah ditentukan.

Tabel 4. 25 Skoring AHP Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah Sarana Perdagangan	Jumlah Sarana Kesehatan	Panjang Jalan	Jumlah Terminal	Jumlah Angkutan Umum/Bis	PDRB	Total
Banyuwangi Utara										
1	Wongsorejo	0,1	0,1	0,1	0,09	0,07	0,1	0,1	1,05	1,71
2	Giri	0,15	0,11	0,09	0,1	0,1	0,1	0,06	0,58	1,29
3	Licin	0,52	0,13	0,15	0,11	0,09	0,09	0,05	0,11	1,25
4	Banyuwangi	0,11	0,12	0,14	0,16	0,09	0,08	0,18	0,12	1
5	Kalipuro	0,08	0,09	0,08	0,1	0,07	0,11	0,05	1,26	1,84
6	Glagah	0,62	0,14	0,14	0,08	0,1	0,1	0,06	0,08	1,32
Banyuwangi Selatan										
1	Bangorejo	0,11	0,09	0,08	0,08	0,06	0,1	0,07	1,23	1,82
2	Siliragung	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,11	0,06	1,35	1,89
3	Pesanggaran	0,14	0,14	0,12	0,14	0,11	0,11	0,07	0,18	1,01
4	Purwoharjo	0,16	0,15	0,13	0,11	0,08	0,06	0,06	0,5	1,25
5	Tegaldlimo	0,4	0,17	0,4	0,1	0,08	0,11	0,05	0,1	1,41

Sumber: Hasil Perhitungan (2013)

Hasil skoring gabungan antar kecamatan di dua wilayah memiliki perbedaan nilai yang tidak terlalu tinggi. Pada wilayah utara skoring tertinggi dihasilkan oleh Kecamatan Wongsorejo sebesar 1,71, sedangkan skoring terendah berada di Kecamatan Banyuwangi dengan nilai skoring 1. Pada wilayah selatan skoring tertinggi dihasilkan oleh Kecamatan Siliragung sebesar 1,89, sedangkan skoring terendah di Kecamatan Bangorejo dengan nilai sebesar 1,15.

Tabel 4. 26 Skoring AHP Wilayah

No	Variabel	Banyuwangi Utara			Banyuwangi Selatan		
		Bobot	Rating	Total	Bobot	Rating	Total
1	Jumlah Penduduk	0,15	2	0,3	0,14	2	0,28
2	Jumlah Sarana Pendidikan	0,12	1	0,12	0,12	1	0,12
3	Jumlah Sarana Perdagangan	0,12	1	0,12	0,12	1	0,12

No	Variabel	Banyuwangi Utara			Banyuwangi Selatan		
		Bobot	Rating	Total	Bobot	Rating	Total
4	Jumlah Sarana Kesehatan	0,11	1	0,11	0,1	1	0,1
5	Panjang Jalan	0,09	1	0,09	0,08	1	0,08
6	Jumlah Terminal	0,11	1	0,11	0,11	1	0,11
7	Jumlah Angkutan Umum/Bis	0,08	1	0,08	0,06	1	0,06
8	PDRB	0,21	2	0,42	0,27	3	0,81
Σ				1,35			1,68

Sumber: Hasil Perhitungan (2013)

Hasil analisis skoring AHP menunjukkan bahwa total skoring di wilayah Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan tidak terlalu menunjukkan perbedaan yang tinggi. Total skoring di wilayah utara sebesar 1,58, sedangkan di wilayah selatan sebesar 1,68. Faktor yang paling berpengaruh adalah yang memiliki nilai skoring tertinggi, yaitu faktor utama adalah PDRB di kedua wilayah ini.

4.2.6 Tingkat Disparitas Wilayah

Tingkat disparitas wilayah dapat diketahui melalui analisis skoring gabungan pada analisis sebelumnya. Analisis yang sebelumnya dilakukan adalah analisis ekonomi (indeks williamson), analisis sarana dan prasarana (indeks skalogram dan sentralitas), dan penentuan faktor paling mempengaruhi disparitas wilayah (AHP dan skoring AHP). Skoring gabungan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat disparitas secara keseluruhan, sehingga analisis-analisis yang telah dilakukan hasilnya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan mempunyai hasil yang dapat disimpulkan dengan baik. Analisis skoring gabungan dilakukan seperti analisis skoring AHP, yaitu dengan memberikan bobot dalam setiap nilai analisis lainnya.

A. Perhitungan Skoring Gabungan

Dalam perhitungan skoring gabungan ini, semua analisis akan dikalikan dengan pembobotan. Penentuan pembobotan disesuaikan dengan hasil tiap analisis. Ada dua analisis sebelumnya yang mewakili variabel kuantitatif yaitu analisis ekonomi (indeks williamson) dan analisis sarana dan prasarana (indeks skalogram dan sentralitas), sedangkan analisis tingkat perkembangan wilayah (indeks perkembangan wilayah) hanya sebagai analisis pendukung, bukan analisis utama sehingga tidak dimasukkan pada analisis skoring gabungan. Kemudian analisis AHP pada analisis ini digunakan sebagai bahan acuan karena analisis ini berdiri sendiri dan berasal dari sumber yang berbeda (*expert*). Bobot yang dihasilkan pada analisis AHP akan dikalikan dengan penentuan scalling pada tabel di bawah ini. Hal ini dilakukan karena variabel di AHP juga termasuk variabel analisis sebelumnya. Nilai *scalling* pada tabel 4.26 sudah

mencerminkan nilai variabel pada analisis tersebut. Setiap analisis memiliki skala tersendiri dikarenakan nilai/ hasil analisis yang satu dengan yang lainnya memiliki range yang sangat jauh, terdapat hasil analisis yang memiliki nilai satuan, puluhan, hingga ribuan. Jika hasil ini disatukan untuk mencari nilai skala, maka tidak akan menghasilkan nilai yang presisi dan tepat.

Tabel 4. 27 Penentuan Rating Skoring Gabungan

No.	Analisis	Rating		
		1	2	3
1.	Indeks Williamson	0,07-0,13	0,14-0,20	0,21-0,27
2.	Indeks Sentralitas dan Skalogram	186,88-190,31	183,44-186,87	180-183,43

Sumber: Hasil Perhitungan (2013)

Tabel diatas menjelaskan bahwa hasil di setiap analisis memiliki nilai rating yang berbeda. Pada indeks williamson, hasil analisis yang mempunyai nilai tertinggi memiliki bobot tinggi juga, sedangkan analisis lainnya tidak. Pada analisis lainnya (indeks sentralitas dan skalogram) semakin tinggi nilai hasil analisisnya, maka pembobotan disparitas semakin rendah. Hal ini karena pada analisis tersebut jika semakin tinggi nilainya maka pemerataan sarana, prasarana dan lainnya pada wilayah tersebut semakin bagus.

B. Disparitas Wilayah

Dalam penelitian ini disparitas/kesenjangan atau wilayah merupakan akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tidak meratanya pembangunan antar wilayah sesuai dengan variabel-variabel yang dikaji pada wilayah penelitian. Hasil akhir pada analisis yang telah dikaji ada dalam hasil analisis skoring gabungan. Bobot setiap variabel dikalikan dengan nilai skala yang telah ditentukan di pembahasan sebelumnya, kemudian memiliki total nilai. Semakin tinggi nilai total, maka semakin tinggi tingkat disparitas, sedangkan semakin rendah nilai total, maka semakin rendah disparitas pada wilayah tersebut.

Tabel 4. 28 Skoring Gabungan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah Sarana Per dagangan	Jumlah Sarana Kesehatan	Panjang Jalan	Jumlah Terminal	Jumlah Angkutan Umum	PDRB	Total	%
Banyuwangi Utara											
1	Wongsorejo	0,2	0,2	0,2	0,18	0,14	0,2	0,2	1,05	2,37	10,37
2	Giri	0,3	0,22	0,18	0,2	0,2	0,2	0,12	0,29	1,71	7,48
3	Licin	0,78	0,39	0,45	0,33	0,27	0,27	0,15	0,11	2,75	12,03
4	Banyuwangi	0,11	0,12	0,14	0,16	0,09	0,08	0,18	0,12	1	4,37
5	Kalipuro	0,24	0,27	0,24	0,3	0,21	0,33	0,15	0,42	2,16	9,45

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah Sarana Per dagangan	Jumlah Sarana Kesehatan	Panjang Jalan	Jumlah Terminal	Jumlah Angkutan Umum	PDRB	Total	%
6	Glagah	0,93	0,42	0,42	0,24	0,3	0,3	0,18	0,08	2,87	12,55
Banyuwangi Selatan											
1	Bangorejo	0,22	0,18	0,16	0,16	0,12	0,2	0,14	0,41	1,59	6,96
2	Siliragung	0,21	0,21	0,24	0,21	0,24	0,33	0,18	0,45	2,07	9,06
3	Pesanggaran	0,42	0,42	0,36	0,42	0,33	0,33	0,21	0,18	2,67	11,68
4	Purwoharjo	0,32	0,3	0,26	0,22	0,16	0,12	0,12	0,25	1,75	7,66
5	Tegaldlimo	0,4	0,34	0,4	0,2	0,16	0,22	0,1	0,1	1,92	8,40

Sumber: Hasil Perhitungan (2013)

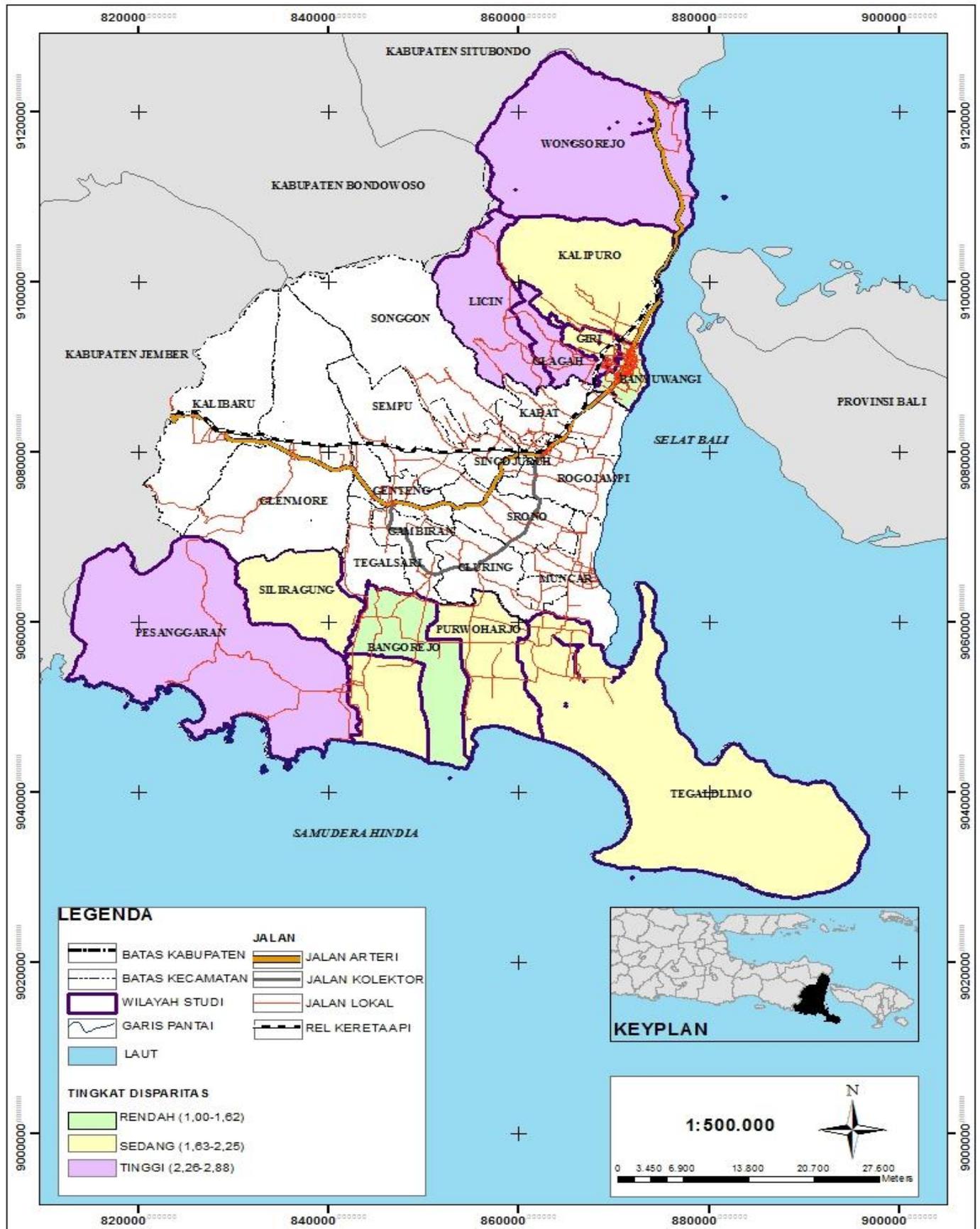
Tabel 4. 29 Kriteria Tingakt Disparitas Kecamatan

No.	Skala	Kriteria
1.	1,00-1,62	Rendah
2.	1,63-2,25	Sedang
3.	2,26-2,88	Tinggi

Sumber: Hasil Perhitungan (2013)

Hasil perhitungan skoring gabungan antar kecamatan menghasilkan disparitas tertinggi di wilayah utara berada pada Kecamatan Glagah dengan nilai 2,87 (12,55%), sedangkan disparitas terendah berada di Kecamatan Banyuwangi dengan nilai skoring 1 (4,37%). Pada wilayah selatan disparitas tertinggi berada di Kecamatan Pesanggaran dengan nilai 2,67 (11,68%), sedangkan tingkat disparitas rendah berada di Kecamatan Bangorejo dengan nilai 1,59 (6,96%).

Faktor utama yang menyebabkan disparitas di Kecamatan Glagah adalah jumlah penduduk, jumlah sarana pendidikan, dan jumlah sarana perdagangan. Sedangkan faktor yang mengakibatkan disparitas di Kecamatan Banyuwangi adalah jumlah angkutan umum/bis, jumlah sarana kesehatan, dan jumlah sarana perdagangan. Pada wilayah selatan, faktor utama yang mempengaruhi disparitas di Kecamatan Pesanggaran adalah jumlah penduduk, jumlah sarana pendidikan, dan jumlah sarana kesehatan. Sedangkan faktor utama penyebab disparitas di Kecamatan Bangorejo adalah PDRB, jumlah penduduk, jumlah sarana pendidikan, dan jumlah sarana perdagangan.



Gambar 4. 12 Tingkat Disparitas Kecamatan

Tabel 4. 30 Skoring Gabungan Wilayah

No.	Variabel	Wilayah Utara			Wilayah Selatan		
		Bobot	Rating	Total	Bobot	Rating	Total
1.	Indeks Williamson						
	PDRB	0,22	3	0,66	0,27	1	0,27
2.	Indeks Sentralitas dan Skalogram						
	Kependudukan	0,15	1	0,15	0,14	3	0,42
	Sarana Pendidikan	0,12	1	0,12	0,12	3	0,36
	Sarana Perdagangan	0,12	1	0,12	0,12	3	0,36
	Sarana Kesehatan	0,11	1	0,11	0,1	3	0,3
	Jalan	0,09	1	0,09	0,08	3	0,24
	Terminal	0,1	1	0,1	0,11	3	0,33
	Angkutan Kota/Bis	0,08	1	0,08	0,06	3	0,18
	Total			1,43			2,46
	100%			36,76%			63,23%

Sumber: Hasil Perhitungan (2013)

Tabel 4. 31 Kriteria Tingkat Disparitas Wilayah

No.	Skala	Kriteria
1.	1,43-1,77	Rendah
2.	1,78-2,12	Sedang
3.	2,13-2,47	Tinggi

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil skoring gabungan wilayah utara memiliki nilai total 1,43 (36,76%), sedangkan wilayah selatan memiliki nilai lebih tinggi namun tidak jauh berbeda yaitu 2,46 (63,23%). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat disparitas di kedua wilayah memang terjadi. Perbedaan perkembangan wilayah ini didasarkan oleh variabel kependudukan, sarana, prasarana dan ekonomi.

Faktor utama disparitas di wilayah utara adalah PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah sarana pendidikan. Sedangkan faktor utama penyebab disparitas di wilayah selatan adalah jumlah penduduk, jumlah sarana pendidikan, dan jumlah sarana perdagangan.

